

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Basko Hotel Kota Padang masih belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Secara normatif, pengusaha memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan tambahan kepada pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, antara lain dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman bergizi, jaminan keamanan serta kesusilaan, dan fasilitas transportasi antar-jemput. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi di lingkungan kerja Basko Hotel.

Hambatan-hambatan seperti fleksibilitas jadwal kerja yang tidak disertai penyesuaian perlindungan, keterbatasan fasilitas, serta minimnya pengawasan dan sosialisasi dari pihak manajemen menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian antara regulasi dengan praktik di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa fasilitas seperti transportasi antar-jemput, makanan bergizi, serta jaminan keamanan belum sepenuhnya diberikan sesuai ketentuan. Beberapa faktor seperti lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran manajemen, serta belum adanya kebijakan internal yang sistematis menjadi penghambat utama dalam pemenuhan perlindungan tersebut.

B. Saran

Untuk menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari, khususnya di Basko Hotel Kota Padang, disarankan agar pihak manajemen hotel melakukan evaluasi terhadap kebijakan internal yang belum sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, seperti penyediaan fasilitas transportasi antar jemput, makanan bergizi, serta jaminan keamanan selama bekerja. Pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan juga perlu meningkatkan fungsi pengawasan dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Di sisi lain, diperlukan pula peningkatan pemahaman pekerja perempuan mengenai hak-hak normatif mereka melalui sosialisasi dan pelatihan berkala, agar mereka dapat lebih aktif memperjuangkan haknya dan mencegah terjadinya pelanggaran. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja itu sendiri, perlindungan hukum dapat diwujudkan secara lebih adil dan menyeluruh.

Perlunya perhatian lebih serius baik dari pihak perusahaan maupun pemerintah sebagai pengawas, untuk memastikan bahwa pekerja perempuan mendapatkan perlindungan yang layak ketika bekerja pada malam hari, demi menjamin keselamatan, kesehatan, dan hak-hak mereka secara menyeluruh.